

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmadja, Arifin P. Soeria.(2013).Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Jakarta:Rajawali Press.

Etty, Susilowati.(2011).Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fuady, Munir.(2017).Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Bandung:Citra Aditya Bakti

Ginting, Elyta Ras. (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta:Sinar Grafika

Hadikusuma, Hilman.(2013).Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.Bandung:Bandar Maju.

Hartini, Rahayu.(2017).BUMN PERSERO Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia.Malang:Setera Press.

Kartono.(1985).Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.Jakarta:Pradnya Paramita

Marzuki, Peter Mahmud.(2016).Penelitian Hukum.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja.2005.Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Shubhan,Hadi.2008.Hukum Kepailitan(Prinsip,Norma,dan Praktik di Pengadilan).Jakarta:Putra Grafika.

Situmorang, Viktor M dan Hendri Soekarso. (1993). Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Rinerka Cipta

Sjahdeini, Sutan Remy.(2010).Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.Jakarta:Pustaka Utama Graviti.

Jurnal

Budiharto, Hendro Saptono.(2016).Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pailit.Diponegoro Law Journal.

Khairandy,Ridwan.(2007).Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan. Jurnal Hukum Bisnis Vol.26 No.10.

Rahadiyan, Indra. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol.20 No.4.

Susanto. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.Pascasarjana Universitas Pamulang.

Susilowati, Etty, Siti Mahmudah, Suradi. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). *Diponegoro Law Review* Vol.5 No.2.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Internet

Erman Rajagukguk, Peranan BUMN dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat, www.ermanhukum.com, diakses tanggal 5 Mei 2020.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kata-pakar-soal-kepailitan-bumn>, diakses tanggal 10 Mei 2020.